

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya Iksaka Banu mengangkat wacana kolonial yang seringkali menarik minat para peneliti untuk mengkajinya, seperti dilakukan Widyaningrum (2016) terhadap cerpen karya Iksaka Banu. Objek kajian yang dibahas berupa nilai pendidikan dan relevansinya dengan materi ajar kajian prosa fiksi di perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan, yakni postkolonial. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah keadaan asli penduduk pribumi pada masa akhir penjajahan Belanda di Indonesia sebagai gambaran dan penggugatan terhadap stigma bangsa kolonial. Berbeda dengan penelitian ini yang mengungkapkan hibriditas dan mimikri di masa penjajahan Belanda di Indonesia.

Wacana kolonial dalam novel *Sang Raja* menjadi objek kajian menarik untuk diteliti. Penelitian dilakukan oleh Nur (2019) dengan objek kajian realitas sosial yang terkandung di dalam novel *Sang Raja*. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pendekatan yang digunakan ialah sosiologi sastra. Realitas sosial yang ditelaah oleh peneliti berupa realitas sosial moral, realitas sosial politik, realitas sosial pendidikan, realitas sosial agama, realitas sosial kebiasaan, realitas sosial ekonomi, dan realitas sosial rumah tangga. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan postkolonial, dan objek kajian berupa bentuk-bentuk hibriditas dan mimikri.

B. Landasan Teori

1. Hakikat Sastra

Menurut Teeuw (2015: 23) kata sastra berasal dari paduan kata “sas” memiliki arti ‘mengarahkan’, ‘pengajaran’ dan “tra” berarti ‘alat’ atau ‘sarana’. Apabila dipahami lebih luas sastra memiliki kedekatan istilah dengan “susastra”. Penambahan kata “su” di depan kata “sastra” memiliki arti ‘baik atau indah’. Wellek dan Warren (2016: 11-14) mengungkapkan bahwa keberadaan sastra dianggap sebagai sebuah karya seni, karya kreatif yang diciptakan dengan membawa nilai estetik di dalamnya.

Kedudukan sastra sebagai karya seni memiliki dunia tersendiri setelah melewati elaborasi oleh pengarang terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya dalam membangun makna. Wellek dan Warren (2016: 16) memperkenalkan penerapan elaborasi dengan konsep estetik, yakni *disinterested contemplation* (kontemplasi objektif), *aesthetic distance* (jarak estetik), dan *framing* (penciptaan kerangka seni).

Kontemplasi objektif dilakukan pengarang untuk menuangkan sudut pandang pemikirannya terhadap kehidupan nyata. Hasil dari kontemplasi pengarang kemudian membedakan antara kehidupan nyata dan tiruan yang dilakukan pengarang sebagai jarak estetik. Adanya jarak estetik menjadikan karya sastra bersifat *probability* terhadap fakta kebenaran. Sifatnya yang fiksi diperoleh dalam tahap *framing*, kerangka analogi peristiwa konkret berdasarkan sudut pandang pengarang. Aristoteles dalam Arsyah (2018: 17) menyebutkan terdapat hubungan masyarakat dan pengarang dalam karya sastra (dalam arti

seni), yaitu sebagai suatu karya untuk menyampaikan pengetahuan yang bersifat retorik dan alat persuasif.

Sifat retorik yang unik memberikan kenikmatan dan memperkaya wawasan mengenai kebenaran berdasarkan makna yang diperoleh dari tiruan kehidupan. Menurut Teeuw (2015: 288) melalui proses semiotik terdapat sebuah komunikasi antar manusia, pengarang dan pembaca menentukan nilai karya sastra dalam kebenaran makna.

Kebenaran makna karya sastra merupakan kriteria khas dari seni, lebih berterima dengan istilah probabilitas daripada fakta yang sifatnya tidak memberikan celah tidak sinkron antara kebenaran empiris dengan rekaan (Wellek dan Warren, 2016: 29). Kebenaran empiris lebih mengharuskan fakta ada secara konkret, namun kebenaran rekaan memancing pembaca untuk berbagai kemungkinan fakta yang bisa terjadi.

Sastra memiliki sifat sosial, berupa konvensi dari norma masyarakat melalui peniruan terhadap realita. Secara implisit memancing pembaca melakukan penafsiran terhadap makna dari perilaku sosial masyarakat pada suatu peristiwa. Menurut Wellek dan Warren (2016: 112) seorang pengarang melalui karya sastra dapat menampilkan fakta subjektif yang menggambarkan pola perilaku sosial masyarakat.

Keterikatan wacana dengan peristiwa dan fenomena kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa karya sastra mencoba mengemas fakta sejarah dengan dilakukan pengolahan ulang oleh pengarang ke bentuk narasi *mimesis* (Plato dalam Noor, 2010: 35). Horkheimer dalam Sindhunata (2019: 177)

mendefinisikan *mimesis* sebagai dorongan meniru yang sifatnya alamiah semata-mata. Plato dalam Teeuw (2015: 169) menjelaskan bahwa *mimesis* terikat pada ide pendekatan, tidak menghasilkan kopi yang sungguh-sungguh, melainkan menarakan tataran yang lebih tinggi.

Peniruan representatif merefleksikan dialektika pengalaman masyarakat dalam relasi sosialnya. Noor (2010: 11) menjelaskan peniruan sebagai aktivitas pengarang yang dipicu sifat inspiratif dunia nyata, hasil tiruan diolah kembali dengan imajinasi sehingga selain bertujuan informatif, juga rekaan suatu fakta dan data sosial.

Mengacu pada pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam karya sastra terdapat adanya fungsi bagi masyarakat. Menurut Horatio dalam Noor (2010: 14) konsep fungsi karya sastra bagi masyarakat memiliki fungsi *dulce et utile* (menyenangkan dan berguna). Dikatakan menyenangkan karena cara pembeberannya dalam mengkonkretisasi pengalaman dapat menyenangkan jiwa, sehingga fungsinya memiliki nilai guna.

Salah satu nilai guna karya sastra, yakni dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan masyarakat (*literature is an expression of society*) (De Bonald dalam Wellek dan Warren, 2016: 99). Perasaan masyarakat berasal dari fenomena sosial masyarakat yang dibebaskan dalam bentuk bahasa tulis. Oleh karena itu karya sastra menarasikan segala peristiwa yang telah maupun sedang dialami masyarakat selama proses penciptaannya.

Perasaan masyarakat melalui peristiwa problematis selalu berkaitan dengan waktu yang kemudian menempatkan karya sastra pada fungsi sebagai

dokumen sejarah. Marx dalam Luxemburg, dkk (1992: 24) menyebutkan sejarah bagi masyarakat akan berkembang terus-menerus, daya-daya kekuatan dalam kenyataan secara progresif membentuk masyarakat yang ideal.

Karya sastra dapat berfungsi sebagai dokumen sosiobudaya yang memiliki daya guna untuk menunjukkan fenomena dalam masyarakat pada masa tertentu, dan memberikan makna beragam dalam kondisi beragam (Swingewood dalam Wahyudi, 2013; Pradopo, 2009: 9). Melalui konsep tersebut peniruan realitas sosial menjadi bentuk tertulis membuat karya sastra dekat dengan cara manusia mengingat peristiwa di masa tertentu. Menurut Welck dan Warren (2016: 100) karya sastra memiliki kedudukan sebagai monumen, sifatnya mewakili zaman dan kebenaran sosial yang dibawa dalam nilai artistik.

Dari penjelasan di atas mengindikasikan adanya relasi antara sejarah dan sastra, meski terdapat perdebatan antara keduanya. Perdebatan relasi sastra dan sejarah sebenarnya bertumpu pada fakta peristiwa yang dinarasikan. Luxemburg, dkk (1989: 148-149) menyebutkan bahwa sastra menarasikan peristiwa yang mungkin terjadi, sedangkan sejarah menarasikan peristiwa yang sudah terjadi.

Sastra memiliki tempat utama bagi masyarakat sebab bahasa di dalamnya tidak terbatas ruang dan waktu, dikarenakan probabilitas fakta dalam karya sastra. Sedangkan sejarah hanya merupakan bagian proposisi masyarakat modern, terbatas dalam memberikan rekaan dan representasi yang menyenangkan bagi masyarakat. Menurut Hutcheon dalam Ratna (2010: 335) fakta sejarah mengacu pada eksistensi ruang dan waktu, dan perlu dipahami oleh

masyarakat lintas ruang dan waktu. Sastra dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut, sebab fakta dapat diorganisasikan dalam konstruksi kebenaran oleh pencerita.

Karya sastra memberikan ruang lebih dekat bagi objek untuk dipahami melalui penceritaan wacana sejarah yang diangkat, membicarakan rangkaian peristiwa sejarah sosial suatu masyarakat. Peristiwa sejarah yang dibangun melalui fakta tersebut salah satunya mengenai kolonialisme. Sejarah nasional suatu bangsa, serta relasi kebudayaan masyarakat yang berhubungan dengannya.

2. Relasi Sastra dan Kolonialisme

Kolonialisme berasal dari kata *colonia* (Latin/Romawi), semula berarti kumpulan, perkampungan, masyarakat di perantauan. Ratna (2008: 20) menjelaskan bahwa kolonialisme bersangkutan dengan masalah dominasi oleh suatu negara terhadap wilayah lain di luar bagian dari kekuasaan asalnya.

Faruk (2014: 109) mengatakan kolonialisasi merupakan gerakan yang berasal dari luar sejak abad XVII sampai dengan awal abad XX menghasilkan formasi sosial tertentu, posisi dan komposisi tertentu pada zaman *Renaissance*. Jansen dalam Ratna (2008: 4) menyebutkan bahwa zaman *Renaissance* merupakan indikator pemicu invasi bangsa Barat ke dunia timur berdasarkan hasrat pembuktian ilmu-ilmu baru.

Kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan agama, serta pola pikir masyarakat Barat. Pembuktian terhadap teori, dan konsep pemikiran dilakukan dengan mengeksplorasi bumi, salah satunya dengan pelayaran lintas benua. Said (2016: 40-41) menjelaskan setelah kolonialis berhasil memperluas kekuasaan, menjadi

indikasi diterapkannya imperialisme, penguasaan berdasarkan sikap dan perilaku. Ratna (2008: 25) mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme muncul bersama-sama serupa dua sisi mata uang.

Kolonialisme diartikan sebagai penguasaan secara fisik menyangkut kekuasaan wilayah, sedangkan imperialisme bersifat non fisik dan lebih serupa kapitalisme. Huntington dalam Ratna (2008: 26) mengatakan imperialisme dan kapitalisme berada di belakang kolonialisme menjiwai hasrat berkuasa penjajah terhadap masyarakat jajahan, mempengaruhi pribumi agar sesuai dengan kebutuhan penjajah.

Hegemoni kekuasaan kolonialisme mengambil alih otoritas pribumi oleh koloni yang mendirikan sistem kekuasaan di tanah jajahan dan tidak membiarkan pribumi memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Menurut Machiavelli (2014: 24, 33) penguasa menyebarkan kekerasan dan penindasan berupaya menerapkan kepatuhan dalam mengatur dan membatasi hak masyarakat. Kekerasan dan penindasan didasari adanya hasrat untuk menduduki daerah lain, dan ketika dilakukan dengan sukses, maka mereka selalu dipuji dan ditakuti.

Hegemoni yang pergerakannya sejajar dengan marginalisasi ras terhadap pribumi perlahan-lahan menjadikan pribumi sosok yang asing pada lanskapnya sendiri (Said, 2017: 69). Keterasingan diakibatkan kesadaran diciptakan penjajah dengan konsep oposisi biner, menerjemahkan penjajah sebagai peradaban maju, menyisihkan pribumi dalam kategori budaya terbelakang, bodoh dan menjijikkan (Kasiyan, 2003).

Hegemoni kultural kolonialisme membentuk sebuah wacana yang dikenal sebagai orientalisme dari adanya praktik kekuasaan politik, kekuasaan intelektual, kekuasaan kultural, dan kekuasaan moral. Keseluruhan kekuasaan yang disebutkan itu mengandung standar yang mengatur hak-hak terbatas bagi pribumi. Inferioritas dimanfaatkan oleh penjajah untuk menjadikan terjajah sebagai “boneka” yang realitas kehidupannya dipengaruhi oleh kehendak hegemoni penjajah yang berpaham orientalisme. Menurut Said (2016: 11) substansi paham orientalisme mengandung legitimasi superioritas yang mendominasi eksistensi terhadap inferioritas kebudayaan terjajah.

Inferioritas menjadi bentuk kesatuan kelas-kelas penguasa yang direalisasikan dalam negara, dan sejarah mereka merupakan sejarah negara dan kelompok-kelompok negara (Gramsci, 2017: 205-206). Kesatuan ini secara fundamental merupakan konkretisasi hubungan antara masyarakat politik dan masyarakat sipil. Menurut Gramsci (2017: 212) “masyarakat politik sebagai kaum moderat pemilik tunggal yang dapat menjalankan politik dalam berbagai bidang masyarakat, sedangkan masyarakat sipil merupakan masyarakat yang sukarela, terhadap adanya kekuatan dominan, mereka hanya berperan dalam memberikan kesepakatan terhadap bentuk penguasaan yang dilakukan kepadanya.”

Bangsa Belanda sebagai masyarakat politik meski tidak berkedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan pribumi sebagai masyarakat sipil yang harus menyetujui keadaan dengan Belanda, meski sebagai kelas moderat di antara pribumi lain. Kekuasaan ini menunjukkan penerapan konstruksi marjinalisasi

identitas antara penjajah dan terjajah. Menurut pendapat Said (2016: xii) marginalisasi berupa doktrin bangsa yang dikategorikan sebagai *the others* (yang lain), sehingga menganggap bangsa terjajah hanya berupa objek kajian.

Kelompok “yang lain” dikooptasi melalui kepemimpinan intelektual, moral, dan politik. Penjajah dalam jumlah sedikit percaya memiliki hak bukan saja mengatur dunia non-putih, tetapi memilikinya. Hartono (2017) mengatakan bahwa terdapat stratifikasi objek kemasyarakatan dalam hegemoni kolonialisme yang menempatkan pribumi pada tempat yang rendah.

“Hegemoni adalah kepemimpinan moral atau kultural yang dipegang tangan kekuatan politik yang mendominasi pihak subordinat” (Faruk, 2007: 30). Belanda pada puncak kekuatan dan pribumi sebagai pihak subordinasi. Said (2016: 164) mengemukakan bahwa hegemoni dalam kolonialisme, penjajah berperan sebagai aktor, sedangkan pribumi hanyalah penanggap (*reactor*) yang pasif.

Hubungan pribumi dengan penjajah berada dalam ranah narasi sejarah masyarakat, dan interaksi sosiobudaya identitas masyarakat tersebut. Kemudian mengingat teks sastra dianggap sebagai dokumen sejarah masyarakat yang disajikan secara imajinatif, terdapat indikasi adanya keterikatan antara kolonialisme dan karya sastra. Menurut Purwanto (2012) kajian kolonialisme dan karya sastra sebenarnya menimbulkan perdebatan, khususnya dalam penggunaan intertekstual untuk mengkaji keadaan suatu fenomena yang dikategorikan fakta dan fiksi. Noor (2010: 73) menjelaskan bahwa fakta dapat dianggap fiksi sebab karya sastra memiliki sifat imajinatif dalam membangun

rekaan, sebaliknya unsur fiksi dapat dianggap fakta sebab karya sastra disajikan berdasarkan sumber fakta empirik.

Realitas rekaan karya sastra mencakup aspek sosial masyarakat yang dapat diteliti dengan kajian intertekstual (Noor, 2010: 38). Unsur fakta maupun fiksi dalam karya sastra dapat ditelaah sebagai suatu gambaran peristiwa sejarah. Karya sastra dapat menunjukkan rangkaian peristiwa kolonialisme yang sifatnya bukan hanya fisik tetapi diskursif. Purwanto (2012) menyebutkan wacana yang dikandung karya sastra dapat berfungsi sebagai penentang maupun unsur penyokong hegemoni kolonial.

Retorika bahasa menggambarkan realitas agar maksud dari diciptakannya teks sastra tersampaikan dengan tepat (Luxemburg 1992: 41). Karya sastra dapat mempengaruhi kejiwaan pembacanya dengan cara ekspresif maupun sugestif, sehingga pembaca dapat memperoleh makna dari suatu rekaan realitas (Noor, 2010: 41). Makna berdasarkan retorika bahasa yang digunakan dalam karya sastra.

Melalui penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai relasi sastra dan kolonialisme, yakni fokus pembahasan keduanya berupa peristiwa sosial yang dialami masyarakat. Keduanya berawal dari realita kehidupan masyarakat. Karya sastra dan kolonialisme dapat menjadi informasi latar belakang perkembangan kebudayaan suatu masyarakat, menjadi dokumen sosial dan sejarah terbentuknya identitas masyarakat pada masa tertentu.

3. Hibriditas dan Mimikri

Persoalan hibriditas dan mimikri berada dalam ranah kebudayaan yang pokok pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari konsep pembentukan kebudayaan manusia. “Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa”(Koentjaraningrat, 2015: 146). “Kebudayaan merupakan tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan cara belajar (*learned behavior*)” (Koentjaraningrat, 2015: 149).

Kebudayaan mengalami perkembangan dalam kehidupan manusia dari bentuk kebudayaan sederhana hingga menjadi kompleks yang dimaksud dengan evolusi kebudayaan (Koentjaraningrat, 2015: 184). Kolonialisme yang menjadi salah satu pemantik terhadap dampak adanya perkembangan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Tazkyatun (2019) mengatakan bahwa konsep hibriditas dan mimikri Bhabha dapat digunakan untuk menjelaskan dampak kolonialisme terhadap identitas penjajah dan terjajah dalam pembentukan kebudayaan. Hartono (2017) menyebutkan bahwa pribumi mengangkat martabatnya melalui berbagai cara, upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan mimikri dan hibriditas.

Hibriditas dan mimikri dapat dipahami sebagai upaya membiasakan wujud dua kebudayaan yang bertemu pada kondisi kolonialisme. Pembiasaan kebudayaan asing kepada diri figur hibriditas dan mimikri dilakukan dengan perilaku meniru wujud kebudayaan. Menurut Subekti (2016) hibriditas dan mimikri terjadi akibat adanya rasa kagum kepada budaya yang tidak dikenal oleh figur hibriditas dan mimikri sebelumnya.

Melalui rasa kagum maka figur hibrid maupun mimikri terlibat dalam perubahan bentuk-bentuk kebudayaan. Sistem kebudayaan asing memiliki wujud-wujud kebudayaannya masing-masing. Wujud kebudayaan tersebut yang kemudian ditiru oleh figur hibriditas dan mimikri. Menurut Koentjaraningrat (2015: 150) wujud kebudayaan terdiri dari a) Kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya; b) Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola yang dilakukan manusia dalam masyarakat; c) Kebudayaan sebagai benda hasil dari karya manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hibriditas dan mimikri terjadi sebagai upaya membiasakan wujud kebudayaan asing dalam masyarakat kolonial, dari penjajah atau terjajah ke dalam identitas personal. Pembiasaan wujud kebudayaan dalam hibriditas maupun mimikri dapat melahirkan masyarakat dengan identitas baru. Hibriditas dan mimikri yang terjadi dari pembiasaan, berangsur-angsur dilakukan dan mengubah wujud kebudayaan murni identitas pelakunya. Sesuai dengan wujud kebudayaan yang dirumuskan Koentjaraningrat, maka bentuk hibriditas dan mimikri terjadi dalam bentuk (a) gagasan, (b) aktivitas, dan (c) benda.

a. Hibriditas

Hibriditas merupakan identitas yang lahir dari perjumpaan masyarakat kolonial dalam kondisi silang budaya dominan dengan yang terhegemoni, namun tidak diketahui otoritas kolonial (Bhabha dalam Sukarwo, 2017).

Hibriditas merupakan perilaku kamufase, provokatif, bid'ah dan kategori disruptif yang terjadi sebagai sebuah kebaruan (Rakhmawati, 2017).

Hibriditas menjadi semacam cara bagi figur pelakunya untuk mengacu pada interaksi antarbentuk kebudayaan yang berbeda, suatu saat menghasilkan bentuk budaya dan identitas baru dengan sejarah perwujudan tekstual sendiri. Hibriditas mencakup tentang cara produk budaya dalam ruang sosio-historis berubah menjadi penolakan paksaan dan kekuasaan kolonial (Day dan Foulcher, 2008: 12, 13).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibriditas merupakan peniruan dua wujud kebudayaan yang berasal dari dua masyarakat yang berbeda. Hibriditas menyilangkan dua wujud kebudayaan dalam diri figur sehingga melahirkan identitas baru dirinya. Hibriditas selain menciptakan identitas masyarakat baru, juga menciptakan budaya baru dan sejarah perwujudan baru suatu masyarakat. Hibriditas yang melahirkan masyarakat dengan identitas baru, melatarbelakangi terjadinya penolakan terhadap kekuasaan kolonial.

1) Proses Terbentuknya Hibriditas

Proses terbentuknya hibriditas diawali oleh tumpang tindihnya kebudayaan. Kebudayaan kolonial tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang dikontrolnya, lebih tepat dikatakan bahwa penjajah maupun terjajah mengalami situasi tumpang tindih yang terus meningkat (Day dan Foulcher, 2008: 109). Identitas hibrid terbentuk dari dua kebudayaan yang tumpang tindih, kemudian menentang oposisi biner.

Perilaku hibriditas menentang konsep oposisi biner yang membuat adanya jarak antar budaya *Diri* dan *Liyan*, penjajah dan terjajah, subjek dan objek (Lingga, dkk, 2019). Dua kebudayaan yang ditiru menempatkan agensi hibrid berada dalam ruang antara, sehingga terbentuknya identitas hibrid tidak dapat dikategorikan sebagai penjajah maupun terjajah.

Hibriditas mengambil sosok antagonis yang tertindas mengacaukan otoritas kolonial, selama pengetahuan kolonial direlatifkan dan direkonfigurasi dalam formasi budaya baru dan diskursif (Bhabha dalam Day dan Foulcher, 2008: 14). Situasi tersebut menempatkan identitas hibrida pada ruang antara yang secara fundamental menjadi strategi kebudayaan, produk budaya hibrid akan menghindari segala kategorisasi oposisi biner, penjajah versus terjajah. Ryan dalam Widyaningrum (2017) menjelaskan bahwa identitas hibrid yang berasal dari transkultur dapat menjadi sebuah rancangan strategi untuk menghancurkan hegemoni kolonial.

Konsepsi hibriditas dalam mencampurkan dua kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru berlangsung dalam proses asimilasi. Koentjaraningrat (2015: 209) mengatakan bahwa asimilasi merupakan proses sosial yang timbul ketika antar golongan manusia yang berbeda berinteraksi intensif sehingga terdapat percampuran kebudayaan yang mengubah identitas kekhasannya.

Asimilasi terjadi dengan diikuti sikap toleransi dan simpati (Koentjaraningrat, 2015: 209). Sikap toleransi dan simpati memperkuat figur hibrid untuk menginternalisasi kebudayaan asing dari lingkungan tempatnya

hidup yang terjadi dalam bentuk-bentuk tertentu. Bhabha dalam Putranto (2011) berpendapat bahwa identitas hibrid menjadi bentuk perlawanan terhadap wacana kolonial, dan menentang negasi “*the other*”, akan tetapi menjadikan “*the other*” bagian dari dirinya.

Munculnya identitas hibriditas di tengah masyarakat kolonial tidak dapat dikendalikan dan benar-benar tidak terkendali (Tickell dalam Day dan Foulcher, 2008: 62). Hibriditas kebudayaan terjadi dalam tiga kondisi, di antaranya (a) hibriditas terkooptasi (b) hibriditas organik, dan (c) hibriditas intensional.

Young dalam Day dan Foulcher (2008: 14) menjelaskan sebagai berikut :

(a) hibriditas terkooptasi, dampak yang ditimbulkan dari hibriditas ini terdapat pada ranah sosial dan politik tentang inautentisitas yang diinternalisasi oleh subjek kolonial, kurangnya memberi pengaruh keagenan, bentuk hibriditas ini paling berkembang dan berbeda dari kekuasaan hegemoni. (b) hibriditas organik, hibriditas ini dilakukan dengan mencampurkan budaya dari adanya interkasi antara kedua pihak penjajah dan terjajah. Percampuran dari interaksi selanjutnya menghasilkan sesuatu yang baru dalam bahasa, pandangan dunia atau objek itu sendiri. (c) hibriditas intensional, hibriditas ini secara sadar mempertemukan dua pihak dengan suara yang bertentangan dalam satu relasi dialogis di mana salah satu pihak membuka kedok pihak yang lain. Menandakan dengan adanya interaksi budaya-budaya berlainan dalam masyarakat kolonial, menjadi lahan subur bagi terbentuknya hibriditas organik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disebutkan ciri adanya hibriditas dalam masyarakat kolonial. Ciri tersebut, yakni a) bertemunya budaya yang benar-benar berbeda antara penjajah dan terjajah, b) hibriditas dilakukan bangsa penjajah terhadap budaya bangsa terjajah, c) hibrida tidak mengakui salah satu kebudayaan secara absah, namun berada di antara keduanya.

2) Bentuk Hibriditas

Hibriditas menciptakan identitas baru di tengah masyarakat kolonial. Akar identitas kebudayaan hibrida mencakup dua kebudayaan yang sebelumnya termarginalkan, dipisahkan oleh stratifikasi superior dan inferior. Namun kehadiran figur hibrida mengubah alienasi heterogenitas untuk menciptakan jati diri suatu masyarakat yang baru.

Tiga wujud kebudayaan yang dirumuskan Koentjaraningrat menjadi dasar bagi figur hibrid dalam melakukan asimilasi kebudayaan yang kemudian dipahami sebagai bentuk dari hibriditas, yang dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

a) Gagasan

Gagasan merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan yang bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diraba dan tanpa wujud materi (Koentjaraningrat, 2015: 151). Apabila mengacu pada pengertian tersebut, maka gagasan mendasari akan dilakukannya aktivitas dan terbentuknya benda dalam suatu kebudayaan. Secara lebih lanjut gagasan dapat ditemukan pada aktivitas yang telah dilakukan dan pada benda yang telah diciptakan manusia.

Gagasan menjadi semacam jiwa dalam sistem kebudayaan yang dijalankan suatu masyarakat. Asimilasi yang dialami figur hibrid mengatarkannya pada pemerolehan gagasan berdasarkan wujud gagasan dari dua sistem kebudayaan yang ada. Dua sistem budaya yang diadopsi bercampur membentuk identitas gagasan baru. Gagasan tersebut tidak bersifat memihak kepada terjajah maupun penjajah, namun berada di antara keduanya.

b) Aktivitas

Kehidupan selalu berkaitan dengan ranah sosial. Sistem sosial masyarakat berisi segala tindakan berpola dari manusia-manusia itu sendiri. Tindakan berpola manusia dijelaskan Koentjaraningrat (2015: 151) sebagai aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul membentuk pola tertentu yang terbentuk oleh adat tata kelakuan yang konkret, terjadi di sekeliling kehidupan masyarakat, dapat diobservasi, maupun didokumentasikan.

Pola aktivitas manusia telah terjadi sejak dulu salah satunya ketika kolonialisme terjadi. Asimilasi kebudayaan dalam kolonialisme melahirkan figur hibrid yang tidak dapat dilepaskan dari budaya disekitarnya. Transkultur yang terjadi dalam diri hibrida mendekati pada pola aktivitas yang berasal dari dua budaya, sehingga dalam aktivitasnya tidak memperlakukan stratifikasi superior maupun inferior. Meskipun asal budaya asli figur tersebut berada pada salah satu stratifikasi tersebut.

c) Benda

Manusia dalam sistem kebudayaannya berdampak pada adanya suatu aktivitas yang menyebabkan terciptanya benda. Koentjaraningrat (2015: 151) menjelaskan bahwa seluruh hasil aktivitas manusia menghasilkan benda-benda konkret dan memiliki nilai guna bagi manusia.

Asimilasi yang terjadi ketika dua kebudayaan bertemu menyebabkan figur hibrida sebagai konkretisasi transkultur memiliki kebebasan dalam penggunaan benda, maupun menciptakan benda. Perilaku figur ini tidak membatasi kategori benda yang boleh digunakan penjajah dan tidak boleh

digunakan, pun boleh digunakan terjajah dan tidak boleh digunakan. Kebebasan otoritas dirinya dalam kebaruan identitas tidak terhalang atau tidak dapat dihalangi oleh peraturan hegemoni kolonial.

b. Mimikri

Bhabha dalam Day dan Foulcher (2008: 105) mengungkapkan bahwa mimikri diartikan sebagai reproduksi subjektivitas Eropa di lingkungan kolonial yang sudah tidak murni, tergeser asal-usulnya dan terkonfigurasi ulang dalam sensibilitas dan kegelisahan khusus dalam kolonialisme. Fanon dalam Day dan Foulcher (2008: 108) menyatakan bahwa mimikri adalah hasil proses kolonialisasi yang memisahkan pribumi dari tradisi dan identitas aslinya sehingga mereka terpaksa beradaptasi dengan identitas di luar dirinya agar serupa bangsa putih atau menghilang. Bhabha menyebutkan terdapat pilihan ketiga yang bersifat ambivalen mengenai eksistensi identitas pribumi, yaitu kamufase, mimikri, oleh kulit hitam/kedok putih.

Mimikri dilakukan terjajah secara terkendali tanpa melewati batas pengawasan penguasa, sehingga pelaku tidak mengajukan tuntutan untuk memperoleh otoritasnya sendiri yang tidak pernah diberikan untuknya (Bhabha dalam Day dan Foulcher, 2008: 106). Mimikri juga sebagai sebuah bentuk *mockery* (ejekan), sikap mengejek untuk identifikasi dirinya dengan penjajah, perpaduan masyarakat rendah dan moderat berkuasa (Faruk, 2007: 6). Konsep ini mengandung adanya ambivalensi dalam diri pribumi yakni pada satu sisi mereka ingin membangun identitas yang membuatnya setara dengan penjajah,

sedangkan di pihak lain mereka ingin mempertahankan budayanya (Bhabha dalam Hardinintyas, 2018: 94).

Mimikri merupakan pendefinisian subjektivitas-subjektivitas tanpa mempredugakan tindakan sosial dan politis dari subjektivitas tersebut dalam kekuasaan kolonial (bukan upaya subversif). Bermunculannya figur mimikri mengakibatkan kaburnya garis demarkasi dan asal-usul kebudayaan (Foulcher dalam Day dan Foulcher, 2008: 113, 114). Batas kebudayaan yang kabur menyebabkan identitas penjajah dan terjajah setara.

Mimikri diidentikan dengan tindakan meniru yang berimplikasi pada penggunaan alat lain dalam proses membangun identitas pasca-kolonial (Wibisono, dkk, 2018). Bukti bahwa eksistensi bangsa terjajah tidak hanya diam menghadapi kolonialisme, tetapi juga memiliki kuasa untuk melawan. Meski perlawanan yang dimaksud tidak diwujudkan melalui kekerasan, melainkan melalui pertahanan (resistensi) identitas.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mimikri merupakan perilaku ambivalen, *mockery* (ejekan). Mimikri terjadi sebagai upaya membiasakan kebudayaan penjajah yang terpaksa diterima terjajah. Mimikri membiasakan wujud kebudayaan asing untuk mempertahankan identitas masyarakat terjajah. Meskipun suatu upaya pertahanan diri mimikri bukan perilaku subversif. Mimikri mengakibatkan hilangnya sebagian wujud kebudayaan asli figur mimikri. Sebab mimikri menyetarakan derajat superioritas penjajah dengan inferioritas terjajah, mengaburkan garis demarkasi kebudayaan. Mimikri mereproduksi wujud kebudayaan penjajah yang dicampurkan dengan

wujud kebudayaan terjajah, sehingga adanya kesetaraan derajat antara terjajah dan penjajah.

1) Proses Terbentuknya Mimikri

Mimikri terbentuk ketika pribumi mengenal kebudayaan penjajah. Perkenalan kebudayaan terjadi melalui pendidikan. Fajar (2011) menyebutkan bahwa pendidikan yang diberikan Belanda distrukturisasi berdasarkan identitas sosial, hanya kaum bangsawan yang memiliki kedekatan dengan Belanda yang diberi akses pendidikan sekolah Belanda. Menurut Sugiyanto (2019) pendidikan sekolah Belanda dalam politik etis ditujukan untuk menciptakan kalangan pribumi elit yang tahu berterima kasih dan bersedia didaya gunakan.

Spivak dalam Morthon (2008: 26) berpendapat bahwa pribumi bangsawan dapat dididik dengan mudah untuk bertransformasi menjadi interpretator antara penjajah dan pribumi rendah, sehingga mereka menjadi pribumi dengan moral penjajah. Said (2016: 53-55) berpendapat bahwa bangsa Timur dapat diperintah tanpa harus memaksakan pandangan ilmiah, namun keterbatasan mereka dalam hal tersebut dapat menjadi instrumen untuk menguasai mereka. Menurut Raffles (2014: 155) secara umum pribumi merupakan kelompok masyarakat yang mempercayai takhayul, mudah terkesan pada hal yang asing baginya dan ini membuat mereka begitu mudah diperdaya.

Melalui rasa terkesan pribumi mencampurkan kebudayaan penjajah yang dianggap agung. Pencampuran kebudayaan mengharuskan pribumi membiasakan diri terhadap wujud kebudayaan penjajah tanpa menghilangkan sepenuhnya kebudayaan aslinya. Wibisono, dkk (2018) mengatakan

kolonialisasi mempengaruhi identitas masyarakat, identitas yang relatif baru dilandasi oleh bercampurnya wujud kebudayaan penjajah terhadap terjajah. Althusser dalam Faruk (2007: 7) menyebutkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang esensial, melainkan hasil konstruksi diskursif melalui interpelasi, identitas menjadi sesuatu yang dapat dinegosiasikan bertumbuhnya heterogenitas kebudayaan.

Konsep mimikri sejalan dengan yang dimaksud Koentjaraningrat tentang akulturasi kebudayaan. Koentjaraningrat (2015: 202) menjelaskan bahwa akulturasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dihadapkan unsur kebudayaan asing yang kemudian diterima namun tidak menghilangkan kebudayaan aslinya.

Modernisasi terjadi ketika figur mimikri menjalani akulturasi yang terjadi dalam dirinya, sehingga modernitas wujud kebudayaan yang ditiru oleh pribumi membentuk identitas baru. Identitas baru ada dari mereproduksi wujud kebudayaan penjajah untuk melengkapi wujud kebudayaan asli. Hall dalam Anoeagrajeksi dan Sudartomo (2013) menyebutkan bahwa kebudayaan yang ada dalam masyarakat kolonial dilandasi oleh adanya peniruan, sebab tidak ada yang murni dan asli dalam setiap perkembangan kebudayaan.

Peniruan oleh masyarakat terjajah terhadap wujud-wujud kebudayaan yang diperlihatkan penjajah, sehingga mau tidak mau pribumi harus menerima dan meniru (*to mimic*) (Bhabha dalam Faruk, 2007: 6). Identitas mimikri terbentuk bukanlah sebagai kepatuhan semata, akan tetapi harus dilakukan

sebagai bentuk eksistensi subjek yang dapat terdesentralisasi (Spivak dalam Faruk, 2007: 7).

2) Bentuk Mimikri

Mimikri yang dilakukan pribumi merupakan manifestasi konstruksi diskursif dalam upaya mempertahankan diri. Selain karena terkesan dengan wujud kebudayaan penjajah, keterpaksaan mendorong pribumi untuk meniru dan membiasakan wujud tersebut. Pembiasaan wujud kebudayaan penjajah yang dicampurkan dengan wujud kebudayaan asli yang tujuannya bukan untuk patuh, tetapi *mockery* (ejekan) melalui penyetaraan wujud kebudayaan. Mimikri terjadi untuk mengimbangi modernitas budaya penjajah.

Bentuk-bentuk terjadinya mimikri dapat dipahami melalui wujud kebudayaan yang dirumuskan oleh Koentjaraningrat, sebab mimikri terjadi dalam wujud kebudayaan, maka bentuk-bentuk dari mimikri dapat dirumuskan yakni, sebagai berikut :

a) Gagasan

Penjelasan mengenai gagasan atau ide sebagai wujud kebudayaan dapat dipahami melalui pendapat Koentjaraningrat. Koentjaraningrat (2015: 151) menyebutkan bahwa gagasan merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan yang bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diraba dan tanpa wujud materi.

Mimikri yang terjadi akibat adanya akulturasi mendorong figur mimikri untuk meniru gagasan yang dihadapkan pada dirinya. Gagasan yang dianggap mengandung modernitas, berasal dari penjajah yang terkesan lebih baik.

Terjadinya mimikri gagasan dalam diri figur mimikri dapat menjadi upaya menyetarakan pola pikir antara penjajah dan terjajah.

b) Aktivitas

Manusia selalu berkaitan dengan ranah sosial. Sistem sosial masyarakat berisi segala tindakan berpola dari manusia-manusia itu sendiri. Tindakan berpola manusia dijelaskan Koentjaraningrat (2015: 151) sebagai aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul membentuk pola tertentu yang terbentuk oleh adat tata kelakuan yang konkret, terjadi di sekeliling kehidupan masyarakat, dapat diobservasi, maupun didokumentasikan.

Aktivitas yang terakulturasi menempatkan figur mimikri untuk melakukan peniruan pola aktivitas yang ada dihadapannya sebagai suatu respon dalam kondisi kolonialisasi. Figur mimikri melakukan identifikasi diri dari marginalitas penjajah. Peniruan terhadap pola aktivitas kebudayaan yang dipisahkan menyebabkan figur mimikri dapat memahami aktivitas yang sebelumnya tidak dikenal olehnya. Perkenalan ini semacam daya resistensi terhadap perkembangan modernitas kebudayaan disekitarnya, sekaligus mengaburkan garis demarkasi.

c) Benda

Manusia dalam sistem kebudayaannya berdampak pada adanya suatu aktivitas yang menyebabkan terciptanya benda. Koentjaraningrat (2015: 151) menjelaskan bahwa seluruh hasil aktivitas manusia menghasilkan benda-benda konkret dan memiliki nilai guna bagi manusia.

Terjadinya mimikri pada benda-benda, peralatan dan perlengkapan manusia menyebabkan bercampurnya benda dari kebudayaan yang digunakan figur mimikri. Akulturasi terjadi ketika figur mimikri mengupayakan untuk menjadikan benda dari wujud kebudayaan asing bukan hal yang aneh untuk digunakan melengkapi peralatan yang masih belum maksimal fungsinya.



C. Kerangka Pemikiran

